

Model-model pengembangan kebijakan pendidikan

Qurratul Aini*, Ema Rizky Ananda

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Sejarah Artikel:

Diterima **September 2023**
Disetujui **Oktober 2023**
Dipublikasi **November 2023**

Kata Kunci:

Model pengembangan
kebijakan; kebijakan
pendidikan; evaluasi
pendidikan

Abstrak: Pendidikan sangat penting dalam kecerdasan manusia. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan model-model pengembangan kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dalam studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model kebijakan pendidikan terdiri dari tiga hal yaitu: (1). Model konstruksi, (2). Model analisis, dan (3). Model implementasi. Model konstruksi meliputi model kelembagaan, model sistem, model survey campuran, model proses, model teoritis kalsik, model rasional, model inkremnetal, model strategis, model demokrasi dan model kelompok, model permainan, dan model deliberative.

Abstract: Education is very important in human intelligence. This article aims to describe models of educational policy development. This research uses qualitative research with a literature study approach. The results of this research show that the education policy model consists of three things, namely: (1). Construction model, (2). Analysis model, and (3). Implementation model. Construction models include institutional models, system models, mixed survey models, process models, classical theoretical models, rational models, incremental models, strategic models, democratic models and group models, game models, and deliberative models.

*e-mail: ainiq138@gmail.com

PENDAHULUAN

Hal ini sangat penting untuk dibicarakan, karena pada umumnya kecerdasan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Melalui pendidikan, individu juga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara. Akibatnya pemerintah tidak lagi mempunyai peran penting dalam pembangunan pendidikan, hal ini terlihat dari adanya salah satu asas pengelolaan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 (Iskandar, 2019). Dalam hal ini jelas bahwa pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang ini merupakan undang-undang terdaftar yang merupakan undang-undang keputusan organisasi, yang bersifat terpadu, yang mengatur perilaku dan bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Dalam hal ini, undang-undang ini akan menjadi undang-undang. Aturan umumnya adalah alat yang memecahkan masalah dengan cepat. Berbeda dengan aturan dan regulasi. Kebijakan-kebijakan ini fleksibel dan fleksibel, meskipun kebijakan-kebijakan ini juga bagus. "apa yang diyakini dan apa yang tidak." Rencana juga harus bersifat umum, namun tidak eksklusif mengenai rincian lokal.

Kebijakan sering digunakan dalam kaitannya dengan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pejabat dan lembaga pemerintah serta perilaku umum dan hal-hal lainnya. Artinya kebijakan sering digunakan dalam politik, karena menimbulkan konsekuensi politik dan moral. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan, alat untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya adalah tentang pencapaian tujuan publik. Ada lima langkah untuk membuat perkiraan, antara lain 1). Penyusunan program, 2). Secara hukum, 3). Persetujuan terhadap hukum, 4). Penerapan. 5). Evaluasi kebijakan(N Dunn, 2003) . Kelima langkah tersebut bersifat sistematis, dan semua langkah tersebut harus dikelola dan dikendalikan oleh pencipta dan pelaksana kebijakan publik. Strategi pengembangan kebijakan di atas berarti bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan mencakup langkah-langkah yang tepat untuk perencanaan, implementasi, dan perbaikan.

Kebijakan yang tidak didasarkan pada lima prinsip di atas memungkinkan para peneliti, sebagai praktisi dan pengambil kebijakan, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan melalui kebijakan yang baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, konsep penelitian kebijakan didefinisikan sebagai proses pendidikan formal dan khusus. Oleh karena itu, kami akan fokus khusus pada Pendidikan (Bintari & Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, 2016). Oleh karena itu, kita harus fokus pada pendidikan terlebih dahulu. Sangat penting untuk memahami bagaimana model kebijakan akan dievaluasi untuk menjamin keberhasilan tujuan pendidikan. Ada banyak jenis pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penulis berpendapat sangat penting untuk menghasilkan artikel yang berjudul Model Pengembangan Kebijakan Pembangunan. Memahami berbagai jenis yang ada dan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tinjauan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, serta observasi empiris dan deduktif yang diperoleh dari sejumlah tinjauan pustaka. Penelitian yang disebut penelitian kepustakaan ini merupakan suatu proses memahami data tertulis dan menafsirkannya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif tertentu yang dimulai dengan mengumpulkan data secara sistematis, terorganisir dan konsisten kemudian menganalisisnya, memilih dan menggabungkannya untuk mencapai kesimpulan yang lebih dalam. Melalui metode publikasi analitis, menarik kesimpulan spesifik dari permasalahan umum. Saat ini sumber data yang digunakan adalah data primer untuk memperkuat dan melengkapi data yang dianggap valid. Dan data sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan adalah surat kabar, buku dan sumber lain yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model-model proses pengembangan kebijakan

Pembuatan kebijakan mempunyai banyak bentuk. Banyak ahli yang menawarkan metode atau model untuk pengembangan kebijakan. Lindblom dkk. membedakan dua jenis metode perencanaan strategis, yaitu tipe umum dan tipe terintegrasi. Dalam sistem sinoptik, terdapat satu otoritas pengorganisasian pusat untuk seluruh masyarakat, menggabungkan kontrol ekonomi, politik dan sosial dalam satu struktur organisasi yang menghilangkan kebutuhan akan hubungan di tengah-tengah orang lain. Sementara itu, dalam proses inkremental, komunikasi menjadi penting dan tidak mengandalkan analisis masalah yang mendalam sebagai acuan penyelesaian masalah. Dalam proses ini, kebijakan yang dibuat dapat bertahan untuk sementara waktu dan dapat diperbaiki tergantung perkembangan permasalahan yang ada (Abdul Aziz & Rida Nurfarida, 2020).

Sedangkan menurut GT Allison, dua model lagi dikembangkan untuk peramal cuaca. Tipe tersebut adalah struktur organisasi dan sistem politik pemerintahan. Organisasi jenis ini mengambil pemerintahan yang kompleks yang terdiri dari organisasi-organisasi informal, yang masing-masing mempunyai kehidupan besarnya sendiri, yang keputusannya bergantung pada hasil dari banyak lembaga, bekerja secara independen sebagai prinsip sesuai dengan perilaku tetapi disusun oleh pemerintah. elit penguasa. Pada saat yang sama, dalam sistem politik pemerintahan, keputusan diambil tidak hanya berdasarkan satu pilihan yang masuk akal, tetapi juga melalui diskusi antara banyak pemimpin dan pejabat tinggi di banyak organisasi. Setiap pemimpin mempunyai sudut pandangnya masing-masing terhadap masalah dan tujuan pribadinya (Abdul Aziz & Rida Nurfarida, 2020). Pendekatan yang umum digunakan dalam implementasi dan perubahan mencakup pendekatan top-down dan bottom-up. Teori di atas memandang pengambil kebijakan sebagai aktor sentral dan berfokus pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi di tingkat pusat. Salah satu kekuatan pendekatan top-down adalah pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi kebijakan bersama dan mengembangkan praktik yang konsisten di berbagai bidang kebijakan. Namun pendekatan top-down banyak dikritik karena hanya menggunakan hukum sebagai acuan. Oleh karena itu permulaannya tidak memperhitungkan pentingnya tindakan sebelumnya.

Pada saat yang sama, pendekatan top-down berfokus pada kelompok sasaran dan pemberian layanan, karena kebijakan dibuat di tingkat lokal (Abdul Aziz & Rida Nurfarida, 2020). Salah satu keuntungan dari pendekatan bottom-up adalah fokusnya pada pemain kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah, sehingga isu-isu terkait lingkungan pelaksanaan menjadi penting. Pendekatan bottom-up tidak memberikan gagasan tetapi hanya menggambarkan faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Proses kebijakan

Sistem politik dapat dipandang sebagai suatu sistem, artinya terdapat masukan, proses, dan hasil dari sistem politik yang berupa undang-undang atau program pemerintah, dan sistem politik tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem politik. konstruksi, pengembangan dan implementasi kebijakan. Pidato dan pembuatan kebijakan adalah proses politik yang didorong oleh para pemimpin politik dan kelompok penekan. Sedangkan hasil proses politik adalah hasil kegiatan politik.

Terkait pengambilan kebijakan, Nugroho menawarkan model-model yang dapat digunakan, yaitu: model korporat, model organisasi, model kelompok, model profesional, model logis, model terintegrasi, model permainan, pilihan publik, model sistem, proses demokrasi, perencanaan dan ideologi.

Model perumusan kebijakan pendidikan

Model kelembagaan (institusionalisme)

Jenis lembaga yang melakukan tugas pembuatan hukum publik adalah tugas pemerintah, jadi apapun yang dilakukan pemerintah, bagaimanapun caranya, adalah hukum publik. Model ini didasarkan pada peran instansi pemerintah di masing-masing daerah pada tingkat penegakan hukum. Menurut Dye, lembaga pemerintah merekomendasikan kebijakan yang ciri utamanya adalah 1). Lembaga negara menjamin legitimasi (hukum), 2). Kebijakan negara bersifat universal dalam arti hanya kebijakan negara yang dapat menyebar, 3). Hanya pemerintah yang mempunyai kewenangan tunggal untuk menetapkan undang-undang kepada masyarakat. Oleh karena itu, standar industri ini dapat diterapkan untuk mengembangkan kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah (Abdul Aziz & Rida Nurfarida, 2020).

Model teori kelompok

Model ini merupakan cerminan dari proses pengambilan kebijakan di mana banyak pihak yang berkepentingan mencoba berinteraksi dengan isi dan bentuk kebijakan. Jadi model ini mengandalkan politik sebagai titik keseimbangan hubungan antar kelompok kepentingan.

Model sistem

Pained aumes memberikan contoh proses peramalan yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh David Easton. Menurut Pained An Naumes, model ini merupakan model karena mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, pengambil kebijakan memandang pekerjaannya dalam perencanaan dan pengorganisasian sebagai upaya mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan. Pertama). Hitung peluang dan dapatkan atau gunakan dukungan internal dan eksternal. 2). Memenuhi persyaratan lingkungan dan 3). Yang terpenting, hal ini memuaskan keinginan atau kepentingan para pengambil kebijakan itu sendiri.

Model penyelidikan campuran

Jenis-jenis yang telah dijelaskan di atas yaitu sistem dan sistem perusahaan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, untuk mencari model yang lebih lengkap, Amiati Etzioni mencoba membuat campuran dengan mengusulkan penggunaan metode penelitian campuran. Dia sangat percaya pada model rasional, tapi dia mengkritiknya dalam banyak cara. Dalam analisis campuran, pengambil keputusan dapat menggunakan logika yang lebih komprehensif dan berkesinambungan dalam situasi yang berbeda. Dalam beberapa kasus, pendekatan bertahap mungkin cukup, namun dalam kasus lain dimana permasalahannya heterogen, pendekatan konservatif dengan menggunakan logika global mungkin tepat. Oleh karena itu, model penelitian campuran ini merupakan model yang potensial. Dunia pendidikan selalu berusaha mengambil keputusan yang berbeda-beda, dengan cara yang logis dan progresif.

Model proses

Model proses mengasumsikan bahwa kebijakan adalah suatu fungsi dan oleh karena itu melibatkan suatu proses. Oleh karena itu, kebijakan publik juga merupakan suatu proses politik yang mempunyai aktivitas berbeda-beda: 1). Identifikasi masalahnya, 2). Menetapkan agenda, 3). Menyiapkan ramalan, 4). Hukum Politik, 5). Implementasi, 6). Tinjau kebijakannya. Oleh karena itu, penulis berpendapat sistem tersebut harus selalu diterapkan dalam dunia pendidikan, agar kebijakan yang diusulkan mengikuti pendekatan yang baik dan tepat.

Model teori elite

Teori elit berasal dari teori politik elit massa, yang didasarkan pada asumsi bahwa dalam masyarakat mana pun pasti ada dua kelompok, yaitu kelompok yang memegang kekuasaan (elit) dan kelompok yang tidak memegang kekuasaan (massa). Teori ini berpendapat bahwa betapapun demokratisnya, bias tetap ada dalam proses pengambilan kebijakan. Karena pada akhirnya, kebijakan

yang diambil konsisten dengan preferensi politik para elite. Model elitis mewakili kepentingan dan nilai-nilai elit daripada memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat.

Model rasional

Gagasan bahwa kebijakan publik berupaya memaksimalkan manfaat publik berarti bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Model rasional menentukan proses pengambilan keputusan yang berbeda yang akan mengarah pada pemilihan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan kebijakan. Rasionalisme berasal dari aliran positivisme dan rasionalisme Pencerahan yang berupaya mengembangkan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kondisi. Pemikiran ini dilandasi oleh keyakinan bahwa berbagai permasalahan sosial harus diselesaikan dengan cara yang ilmiah dan rasional, yaitu dengan mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan dan metode yang berbeda-beda, kemudian memilih solusi yang dianggap terbaik.

Model inkrementalis

Model ini merupakan kritik terhadap model rasional. Contoh tambahan menekankan bahwa pembuat kebijakan tidak menerapkan langkah-langkah yang diperlukan melalui proses yang rasional karena mereka tidak mempunyai cukup waktu, kecerdasan, atau uang dan takut akan konsekuensi yang tidak baik. Model ini berupaya beradaptasi dengan realitas kehidupan praktis dengan memanfaatkan pluralisme dan demokrasi serta sejauh mana hak asasi manusia.

Model strategis

Yang disebut perencanaan adalah suatu metode yang melibatkan perencanaan sistematis sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pemahaman strategis adalah upaya disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu masa depan suatu organisasi atau lainnya. Apa yang dilakukan organisasi ini dan mengapa melakukan hal seperti ini? Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi rinci, mengevaluasi alternatif, dan menekankan dampak keputusan saat ini terhadap masa depan. Perencanaan strategis lebih fokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah, lebih fokus pada analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, serta berorientasi pada tindakan. Oleh karena itu, proses perencanaan merupakan contoh yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, karena kebijakan yang dikembangkan akan didasarkan pada alternatif-alternatif penyelesaian permasalahan yang timbul, sehingga sistem tersebut dapat memberikan efisiensi yang lebih besar. dan perbaikan di bidang tersebut. di masa depan.

Model demokratis

Model ini menekankan bahwa pengambilan keputusan harus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Artinya, model ini mengharuskan banyak orang yang mempunyai hak demokratis berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Model teori permainan

Model ini merujuk pada gagasan, khususnya: pertama, menerapkan hukum dalam konteks persaingan yang kuat. Kedua, Katir mendapati dirinya berada pada posisi pilihan yang tidak mandiri atau bergantung, melainkan pada posisi kehendak bebas. Oleh karena itu, konsep penting dalam sistem permainan adalah strategi bertahan, yaitu aturan yang paling aman tetapi bukan yang terbaik. Pada dasarnya. Konsep permainan ini diwujudkan menjadi kenyataan praktis dengan asumsi masyarakat tidak hidup terisolasi sehingga lingkungan tidak bersifat sementara.

Model deliberatif

Padahal, model ini berarti bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus menjadi pilihan bagi mereka yang menggunakannya. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan publik melibatkan keterlibatan masyarakat melalui kelompok kepentingan. Secara umum, konsep ini merupakan

konsep yang paling demokratis dalam menciptakan kebijakan publik karena memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk menginformasikan preferensinya kepada pemerintah sebelum mengambil keputusan. Penelitian hukum publik jenis “refleksi” ini sangat berbeda dengan proses teknisnya karena peran penelitian hukum hanya membantu masyarakat mengambil keputusan hukumnya sendiri. Model ini disebut juga kebijakan argumentatif, yaitu strategi kebijakan yang mengambil argumen tertulis dari anggota atau peneliti sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik

Implementasi mengacu pada proses pengelolaan urusan publik, yang juga dikenal sebagai pengendalian administratif. Administrasi publik dilakukan dalam bentuk *good governance*. Kebijakan publik di bidang pendidikan dapat dipahami sebagai keputusan bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terselenggaranya atau non-kebijakan dan sektor pendidikan bagi seluruh warga negara. Kebijakan publik di bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum sekolah, rekrutmen staf akademik, pengembangan profesional staf, real estate, pengelolaan sumber daya dan kebijakan lainnya. Buku-buku lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pendidikan (Majid, 2018).

Dalam kebijakan publik, kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan selalu mengacu pada manajemen pendidikan secara umum. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan tidak berbeda dengan prinsip-prinsip teori manajemen pada umumnya, karena kerja manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pemikiran yang ditetapkan oleh sistem manajemen pelatihan. Penerapan manajemen dalam bidang tujuan pendidikan menunjang tercapainya tujuan pendidikan, adapun cara kerja dan strategi pemikiran manajemen mempunyai prinsip yang sama dengan strategi yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Proses implementasi kebijakan pendidikan

Ardiyansyah berpendapat bahwa kebijakan pendidikan mempunyai banyak ciri, antara lain: 1). Memiliki tujuan pendidikan, 2). Ada aspek hukum – hukum, 3). Terdapat perspektif kinerja, 4). Pemegang hak cipta, 5). Dapat diperiksa, dan 6). Prosedur. Organisasi Pengembangan Pendidikan Afrika Sebutkan beberapa elemen yang harus disertakan dalam kebijakan tersebut: 1). Memiliki basis pengetahuan yang baik, 2). Percayalah bahwa hidup ini kuat dan stabil. 3), akan lebih efektif jika ada konsultasi dan partisipasi. 4). Harus ada prioritas di antara berbagai tujuan yang ingin dicapai. 5). Membutuhkan sumber daya keuangan dan kolaborasi yang efektif. 6). Harus mampu menciptakan sistem pendidikan sosial dan mengkomersialkan visi pendidikan nasional, dan 7), berkelanjutan dan interaktif, termasuk pada tataran implementasi.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan perkembangan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut: Pertama, kebijakan pendidikan dikaitkan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan merupakan ilmu praktis dan kebijakan pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang berlangsung dalam lingkungan dan hubungan antarmanusia. Jadi kebijakan pendidikan merupakan gambaran visi dan tujuan pendidikan di suatu negara.

Kedua, kebijakan pendidikan berasal dari ilmu praktik pendidikan dan oleh karena itu mencakup proses analisis, pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sistem politik dapat menggunakan bentuk standar. Meskipun model-model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan menggabungkan model-model yang berbeda dapat menciptakan suatu sistem yang dapat berjalan dengan baik. Ada banyak jenis kebijakan pendidikan yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu 1). Tipe sistem, 2). Model penelitian, DNA 3), model implementasi. Model yang membangun meliputi model kelembagaan,

model proses, model inkuiri campuran, model prosedural, model formal, model logis, model terpadu, model perencanaan, model kelompok, model permainan, model demokrasi dan model diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A., & Rida Nurfarida. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume. 4, Nomor 2.
- Bintari, A., & Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tnetnag Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2
- Majid, A. (2018). Analisis kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Samudra Biru.
- N Dunn, W. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gajah Mada, University Press.